



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

**UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARMEN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **219265**

### II. DATA HARTA

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.327.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/150 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/87 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/208 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/175 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 151.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 109.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 130.000.000**

**D. SURAT BERTHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 21.000.000**

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.629.000.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.629.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.